

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Faozi, 2015). Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas

dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa mempunyai beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP Nomor 60 Tahun 2014), yang dimana sumber pendapatan tersebut dikelola oleh pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perihal pengelolaan keuangan, pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mendukung dalam pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati.

Perlu adanya kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan baru yang berlaku agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan di desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan

pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Di samping itu, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Tanjung, 2000). Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, kedua, laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Demi membantu menatausahakan dana desa maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Pati menerapkan aplikasi berbasis online yakni SISKEUDES Online atau Sistem Keuangan Desa Online. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran dana desa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada.

Sistem Keuangan Desa Online menghendaki adanya transparansi dalam realisasi APBDes tiap tahunnya. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu: pertama, keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan sistem. Kedua, kecepatan dan ketepatan waktu. Tingkat

kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, ketelitian. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan ada dua yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Keempat, variasi laporan atau *output*. Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi tidak saja mengenai *volume* tetapi juga informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi, dan kelima, relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data.

Variabel ini menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan (Bodnar dan Hopwood, 2006). Namun, didalam setiap proses pengelolaan keuangan desa masih saja ditemukan kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis, maka dari itu peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam terkait permasalahan realisasi *E-Government* (SISKEUDES Online) Kabupaten Pati.

Adanya Implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati memiliki kompetensi yang relevan dengan ilmu pemerintahan dikarenakan SISKEUDES merupakan produk kebijakan pemerintah berbasis *online* sebagai bentuk dari *E-Government*. Selain itu, implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati khususnya pada tahun 2018-2020 menjadi topik yang menarik untuk dievaluasi dikarenakan pada tahun 2019 Kabupaten Pati kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa

Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 selain Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Pekalongan. Penghargaan yang diterima merupakan hasil capaian segenap komponen pemerintah daerah daerah Kabupaten Pati beserta jajarannya yang telah berhasil melakukan penyusunan laporan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik, salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari negara. Dalam hal ini penerapan Aplikasi SISKEUDES dapat menjadi objek evaluasi karena terdapat banyak pihak yang terlibat, serta dasar hukum yang mengatur dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka dapat dilihat integritas dari Pemerintah Kabupaten Pati didalam penerapan Aplikasi SISKEUDES Online secara keseluruhan di seluruh desa di Kabupaten Pati.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas mengenai pelaksanaan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati, sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan evaluasi implementasi dari penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan. Terutama dalam bidang studi ilmu politik, yaitu mengenai evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa Online di Kabupaten Pati.
- b. Memberikan pengetahuan tentang evaluasi implementasi pelaksanaan keuangan desa yang transparan terutama kendala apa saja yang mempengaruhi implementasi Sistem Keuangan Desa Online di Kabupaten Pati.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan desa.
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat luas diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

1.5. Tinjauan Literatur

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan kepustakaan dalam kajian “Evaluasi Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020” belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada penelitian yang relevan dengan yang penulis teliti, hanya subjek

yang dikaji berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, antara lain:

1. Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang) oleh Firna Maristha Prihardini. Penelitian ini membahas tentang analisis Aplikasi SISKEUDES di Desa Tajinan dan mengetahui apakah penggunaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SISKEUDES 2017 sangat membantu Desa Tajinan terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun di dalam praktiknya pengelolaannya antara Desa Tajinan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa oleh Wahyuni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penerapan SISKEUDES Desa Selokgondang didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/8350/2015 BPD tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa telah menunjukkan sikap tanggap dengan mengakomodasi usulan kegiatan di Musrembang yang paling mendesak ke dalam RKP Desa Selokgondang. Dalam hal transparansi, Pemerintah Desa hanya transparan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kementerian

Dalam Negeri, namun tidak transparan dalam pelaporannya kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa belum didukung oleh profesionalisme aparatur yang memiliki kapasitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Secara keseluruhan, implementasi aplikasi SISKEUDES Desa Selokgondang telah menerapkan konsep akuntabilitas. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti transparansi kepada masyarakat, karena aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Kemudian perlu adanya pelaporan keuangan desa untuk masyarakat berbasis aplikasi, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi SISKEUDES serta penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara profesional.

3. Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa oleh Gayatri dan Made Yenni Latrini. Penelitian ini menyimpulkan penerapan aplikasi SISKEUDES untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Saran bagi penelitian selanjutnya untuk menilai efektivitas dari program-program yang direncanakan dan dilaksanakan di desa yang dibiayai dari dana desa. Penelitian berikutnya akan dilakukan dengan membandingkan penerapan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) dengan 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali dan telah menerapkan aplikasi SISKEUDES. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan dan

pertanggungjawaban secara lengkap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa) oleh Reski Amalia Putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Desa Jennetallasa telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan sudah terstruktur dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.

Walaupun banyak penelitian serupa mengenai SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online, namun penelitian ini merupakan penelitian baru bukan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu dikarenakan belum ada yang mengkaji mengenai evaluasi implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Teori Evaluasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) bahwa “Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “Proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi (2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai:

“Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya”.

Istilah Evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau

manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (William Dunn, 1998:608).

Ada banyak jenis evaluasi tergantung pada objek yang dievaluasi dan tujuan evaluasi. Mungkin perbedaan mendasar yang paling penting dalam jenis evaluasi adalah antara evaluasi formatif dan sumatif.

1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi, mereka membantu membentuknya dengan memeriksa pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, kualitas implementasinya, dan penilaian konteks organisasi, personel, prosedur, input, dan sebagainya. Evaluasi formatif mencakup beberapa jenis evaluasi:

- a. Penilaian kebutuhan (*needs assessment*), menentukan siapa yang membutuhkan program, seberapa besar kebutuhan itu, dan apa yang mungkin berhasil untuk memenuhi kebutuhan itu.
- b. Penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*), menentukan apakah suatu evaluasi layak dan bagaimana pemangku kepentingan dapat membantu membentuk kegunaannya.
- c. Konseptualisasi terstruktur (*structured conceptualization*), membantu para pemangku kepentingan mendefinisikan program atau teknologi, populasi target, dan hasil yang mungkin.

- d. Evaluasi implementasi (*implementation evaluation*), memonitor ketepatan program atau teknologi.
- e. Evaluasi proses (*process evaluation*), menyelidiki proses penyampaian program atau teknologi, termasuk prosedur penyampaian alternatif

2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif, sebaliknya, memeriksa efek atau hasil dari beberapa objek – mereka meringkasnya dengan menggambarkan apa yang terjadi setelah pelaksanaan program atau pemakaian teknologi; menilai apakah objek dapat dikatakan telah menyebabkan hasil; menentukan dampak keseluruhan dari faktor penyebab di luar hanya hasil target langsung; dan, memperkirakan biaya relatif yang terkait dengan objek. Evaluasi sumatif juga dapat dibagi menjadi:

- a. Evaluasi hasil (*outcome evaluations*), menyelidiki apakah program atau teknologi menyebabkan efek yang dapat dibuktikan pada hasil target yang ditentukan secara spesifik.
- b. Evaluasi dampak (*impact evaluation*), lebih luas dan menilai dampak keseluruhan- baik yang disengaja atau tidak – dari program atau teknologi secara keseluruhan.
- c. Keefektifan biaya dan analisis biaya-manfaat (*cost-effectiveness and cost-benefit analysis*), menjawab pertanyaan efisiensi dengan menstandarkan hasil dalam hal biaya dan nilai dolarnya.

- d. Analisis sekunder (*secondary analysis*), menguji kembali data yang ada untuk menjawab pertanyaan baru atau menggunakan metode yang sebelumnya tidak digunakan.
- e. Meta-analisis (*meta-analysis*), mengintegrasikan estimasi hasil dari beberapa studi kasus untuk sampai pada penilaian keseluruhan atau ringkasan pada pertanyaan evaluasi.

Dari berbagai jenis penelitian evaluasi, penelitian ini menggunakan jenis evaluasi proses. Dikarenakan bertujuan untuk mengevaluasi proses penyampaian dari produk kebijakan berupa inovasi didalam pengelolaan keuangan desa secara online menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati.

1.6.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu kegiatan didalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berkaitan erat dengan kepentingan publik dan kemudian bisa diterima oleh publik. Yang menjadi fokus peneliti adalah melihat bagaimana tingkat kepatuhan (*compliance*) dalam sebuah implementasi proses kebijakan, karena dengan melihat kepatuhan bisa menilai bagaimana sebuah kebijakan bisa di evaluasi dengan kesimpulan gagal atau berhasil. Kepatuhan (*compliance*) disini juga melihat apakah yang diperintahkan sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, atau justru terjadi ketidakcocokan. Untuk melihat bagaimana implementasi proses kebijakan dijalankan terkait kepatuhan (*compliance*), maka peneliti mencoba melihat variabel-variabel yang bisa menjadi fokus dengan menggunakan model

implementasi Geoge C. Edwards III yang melihat empat faktor sebagai pertimbangan melihat bagaimana implementasi kebijakan dijalankan, dan dengan metode ini juga dapat menjawab bagaimana variabel kepatuhan (*compliance*) atau faktor didalam proses implementasi kebijakan. George C. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni *Communication, Resourches, Dispotition or Attitudes*, dan *bureaucratic Structure*, menjelaskan empat faktor yang dimaksud yakni:

1. Komunikasi, merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
2. Sumber-sumber daya (*resources*), dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
3. Sikap-sikap (disposisi), sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
4. Struktur, dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah

pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa yang menjadi pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1.6.3. Teori E-Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area*

Networks (WAN) internet, *mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2005:5) menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama daripada stakholder yang ada.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efesien. Pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah upanya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi *E-Government*.

Tanpa mengecilkan arti dari beragam definisi yang telah disampaikan diatas setidaknya-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *Electronic Government (E-Government)*, yaitu: Pertama, merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada; serta

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Konsep *E-Government* diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang ke semuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan *E-Government* adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan *E-Government* adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan *E-Government* akan menghasilkan 4 (empat) hubungan bentuk baru yaitu G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. *Government to Citizens* (G-to-C), merupakan aplikasi *E-Government* yang dibangun untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
2. *Government to Business* (G-to-B), merupakan salah satu tugas utama dari sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk

memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government to Governments (G-to-G)*, Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan.
4. *Government to Employees (G-to-E)*, aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *E-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah. Keberadaannya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat industri kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan

kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, interaktif dan imajinatif.

1.7. Definisi Konseptual

1. Analisis Evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa Online. Penelitian ini mengevaluasi implementasi SISKEUDES Online berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Geoge C. Edwards III yakni:

- a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.

- b. Sumber-sumber daya (*resources*)

Sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

- c. Sikap-sikap (*disposisi*)

Sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.

d. Struktur

Dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

2. Penggunaan SISKEUDES Online dalam kerangka *E-Government*.

Implementasi Aplikasi SISKEUDES merupakan salah satu hal baru bagi Kabupaten Pati di Tahun 2016 dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes Online merupakan salah satu bentuk inovasi *E-Government* untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada baik dari segi sumber daya material maupun sumberdaya manusianya didalam penngelolaan keuangan desa secara *online*.

Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan E-Government akan menghasilkan 4 (empat) hubungan bentuk baru yaitu G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Government to Citizens* (G-to-C), merupakan aplikasi *E-Government* yang dibangun untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

- b. *Government to Business (G-to-B)*, merupakan salah satu tugas utama dari sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
- c. *Government to Governments (G-to-G)*, Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan.
- d. *Government to Employees (G-to-E)*, aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *E-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah. Dalam Penelitian ini berfokus pada model *Government to Employee* dimana Penerapan Aplikasi SISKEUDES ini

merupakan salah satu inovasi dari Pemerintah Republik Indonesia didalam pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementrian Dalam Negeri. Penerapan Aplikasi SISKEUDES ini melibatkan Pemerintah Kabupaten bersama OPD terkait bersama Aparatur Desa didalam pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Untuk mengetahui keberhasilan dari proses Evaluasi Implementasi Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020 maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Fuad dan Nugroho (2014:54) yakni suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian kualitatif didefinisikan Ghony dan Almanshur (2016:25) merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* (kualitas) atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pengembangan konsep teori. Deskriptif menurut Danandjaja (2012:29) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba ini melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pertama, penelitian ini sangat membutuhkan evaluasi proses yang dapat menggambarkan dan mendeskripsikan Implementasi SISKEUDES dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Alasan yang kedua, yaitu penelitian ini membutuhkan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dari hasil evaluasi dari Implementasi Aplikasi SISKEUDES sebagai salah satu bentuk penerapan *E-Governement* yang merupakan hal baru dan wajib diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Pati, maka hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Pati sebagai situs penelitian atau daerah penelitian, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online dalam inovasi pelayanan publik per 1 Januari 2017, dan Kabupaten Pati merupakan Pemerintah Kabupaten yang terhitung awal menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online sejak *launching* pertama pada tahun 2016.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah unsur Pemerintah Daerah dan unsur Pemerintah Desa yang paham dan terkait dengan implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati, yaitu:

1. Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

2. Fungsional Umum Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
5. Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
6. Sekretaris Desa Bodeh Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
7. Staff Urusan Keuangan Desa Kudukeras Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1.8.4. Jenis Data

Data yang akan digunakan berupa data kualitatif, berbentuk teks, simbol, kalimat atau frasa yang menggambarkan tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam penelitian guna menjelaskan Evaluasi Implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020.

1.8.5. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang mendukung dalam penelitian dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai

sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini, peneliti untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh melalui sumber sekunder seperti studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku referensi, jurnal, dan studi literatur lainnya. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku, laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi SISKEUDES Online.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penemuan informasi, *teknik pengumpulan data* merupakan faktor penting demi kebenaran suatu informasi. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar. Teknik pengumpulan data juga merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Oleh karena itu dalam teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan dengan dua cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Licoln dan Guba (1985: 268), antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan yang eksplisit (Afifuddin, 2009: 131).

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*chek list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana

pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam Poerwandari, 1998).

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) perlu dilakukan pula sebagai studi permulaan atau penjelajahan umum di lokasi penelitian guna menentukan fokus penelitian. Wawancara pada awal pengumpulan data sebaiknya ditetapkan topiknya secara spesifik, kemudian dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk pertanyaan yang lebih mendalam guna memperoleh data yang lebih akurat, sebelum dilakukan pertanyaan yang merupakan penutup wawancara.

b. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

2. Studi Dokumentasi

Selain wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data.

Menurut John W. Creswell (2016: 329) bahwa dokumen kualitatif adalah dokumen publik (misalnya: surat kabar, arsip pertemuan, laporan resmi), atau dokumen pribadi (misalnya: jurnal dan diari pribadi, surat serta email). Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah arsip data yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terkait implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Moleong (2017), analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas. Adapun kegiatan dalam analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemuihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, pentransformasian data kasar yang muncul dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.8.8. Kualitas Data

Penelitian kualitatif memiliki instrumen utama manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya, untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2012: 330), ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang

telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk pengecekannya.

Pada penelitian ini, variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data. Hal ini karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antara faktor unsur pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sehingga data yang dihasilkan tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja melainkan dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini, keberadaan data yang bervariasi akan membuat peneliti melakukan analisa lebih mendalam pada penelitian ini.